

Politik Identitas dan Populisme Islam di Era Pascakebenaran:**Sebuah Overview Singkat¹****Oleh: Tedi Kholiludin²**

Dua penanda setidaknya menyertai realitas masyarakat yang hidup di era post-truth (pascakebenaran); politik identitas dan populisme. Kenyataan ini, dalam ilmu politik, sesungguhnya dua fenomena yang bermakna dinamis. Ia tidak menunjukkan gejala apapun selain realitas politik itu sendiri. Politik identitas serta populisme bisa memiliki watak progresif juga konservatif. Karakteristiknya sangat ditentukan oleh bagaimana situasi sosial-politik masing-masing tempat.

Sejak istilah pascakebenaran meramaikan diskursus politik tahun 2016, masyarakat Indonesia sudah terlebih dahulu menyaksikan betapa kuatnya bangunan politik identitas dan penyebaran gejala populisme, yang dalam konteks ini adalah populisme Islam. Ia menggurita seiring dengan pergulatan politik yang begitu keras. Dalam dinamika itu, Politik identitas dan populisme Islam menunjukkan wataknya yang konservatif.

Bagaimana memahami dan menjelaskan bangkitnya konservatisme di Indonesia?

Ada dua penjelasan yang biasa digunakan untuk menyimak fenomena (pinjam istilahnya Martin van Bruinessen), *conservative turn* (belok ke arah konservatif) di Indonesia. Pertama, apa yang terjadi di sekitaran kita ini merupakan bagian dari situasi global yang memang mengarah pada kecenderungan konservatif. Salah satu peristiwa yang kerap dijadikan contoh adalah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Bom bunuh diri di Manchester, Inggris serta serangan kelompok Maute di Kota Marawi, Filipina adalah sedikit dari banyak situasi yang menggambarkan betapa konservatisme, bahkan dalam beberapa kasus diiringi dengan serangan teror adalah fenomena yang mengglobal. Sederhananya, pendulum sedang bergerak ke arah konservatif, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya.

¹Disampaikan pada Seminar Nasional Politik dan Hubungan Internasional, "Demokrasi pada Era Post-Truth: Tantangan dan Peluang", yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Bertempat di Gd. B Lantai 3 Kampus Sampangan, 28 Agustus 2019.

²Sosiolog Agama, Staf Pengajar Universitas Wahid Hasyim dan Peneliti di Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA).

Argumen kedua mengatakan bahwa arus konservatisme keagamaan di Indonesia merupakan fenomena momentual yang sesungguhnya diawali sejak era reformasi. Gejala konservatisme adalah situasi yang terfasilitasi melalui berbagai kesempatan. Ada media massa, media sosial, rumah ibadah, sekolah dan ruang publik lain yang kerap menjadi sarana untuk diseminasi ide-ide konservatif. Karenanya, jika akhir-akhir ini kita menemukan gejala yang semakin menguat, maka hal tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang betul-betul baru terjadi.

Bangkitnya Politik Identitas

Pada masa reformasi, gejala bangkitnya politik identitas dilatari oleh beberapa faktor. Pertama, apa yang dalam teori gerakan social dikenal sebagai struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*). Kian kebebasan yang begitu terbuka, memberikan keleluasaan kepada semua kelompok untuk tampil di gelanggang politik. Situasi yang dulu, tidak pernah mereka dapatkan karena orde baru begitu ketat mengontrol kelompok ini.

Kedua, munculnya, pinjam bahasa Mujiburrahman (2006) “perasaan terancam” dari golongan lain yang berbeda identitas agama. Kelompok Islam merasa terancam dengan agenda Kristenisasi, dan umat Kristen begitu cemas akan gerakan Islamisasi. Situasi inilah yang pada gilirannya menggugah kesadaran kelompok tertentu untuk menunjukkan eksistensinya.

Ketiga, ada faktor menurunnya tingkat kepercayaan public terhadap pemerintah, karena gagal membangun fondasi system ekonomi yang solid. Imajinasi tentang negara agama kemudian dihadirkan sebagai alternatif. Keempat, tumbuhnya “solidaritas negatif” karena menyaksikan “penindasan” terhadap kelompoknya di belahan dunia lain. Solidaritas terhadap saudara-saudaranya yang seiman “disana” itu kemudian ditunjukkan dengan membalasnya “disini.”

Kontestasi ideologi di negara majemuk seperti Indonesia tak bias dihindarkan. Sayangnya, saringan terhadap kontestasi tersebut bukanlah akal sehat atau nalar publik, tetapi identitas agama. Memilih pemimpin berdasarkan kesamaan agama menjadi panorama dominan dan lebih diutamakan ketimbang pilihan atas dasar rasio, jejak rekam yang apik atau program yang berpihak. Imbas dari saringan yang tribalistik itu adalah politik pengakuan sekaligus politik pembedaan. Yang berbeda kemudian dibedakan. Interaksi bersifat antagonistik. Jarak antara aku-kamu, kita-mereka, menjadi

semakin lebar. Segregasi antara pribumi-non pribumi, putera daerah-pendatang terus direproduksi. Karena perbedaan ini muncul secara kasatmata, maka tidak terlalu sulit untuk menyebarkannya sebagai bahan untuk mengokohkan bangunan politik identitas.

Menunjukkan identitas keruang public sesungguhnya masih bias dimaklumi sejauh ia masih konsisten pada dua hal. Pertama, identitas kolektif yang diinstitusionalisasi bertujuan untuk mengokohkan keragaman. Meski beragam, mereka sama-sama berseragam merah putih. Kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah sumbangan kelompok-kelompok primordial. Organisasi kedaerahan, keagamaan dan kepemudaan, memiliki saham dalam perjuangan kemerdekaan. Kedua, organisasi atau kelompok yang dibangun atas dasar agama, etnis dan lainnya menunjukkan komitmennya terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Mengorganisir identitas keagamaan untuk sebuah tujuan politik, sekali lagi, menjadi konsekuensi demokrasi. Harus dipastikan bahwa dalam panggung demokrasi ada sebuah acuan bersama, yakni konstitusi demokratis. Didalamnya adalah rumusan yang mampu menengahi masalah agama maupun politik. Ia bias memastikan bahwa konstitusi yang demokratis harus konsisten dengan keyakinan keagamaan yang beragam dan harus mendapatkan afirmasi oleh para pengikut dari berbagai keyakinan keagamaan.

Populisme Islamdi Indonesia

Tak hanya tampil sebagai fenomena gerakan, populisme juga turut hadir sebagai pemimpin politik. Ciri yang ditampilkan oleh gerakan populisme dipengaruhi konteks sosialnya. Syriza di Yunani atau Podemos di Spanyol mengesankan sebuah pola yang progresif. Syriza merupakan koalisi partai-partai sayap kiri dan kiri radikal dan kabar terkini, ia menjadi partai politik. Sementara Podemos adalah partai politik sayap kiri di Spanyol yang didirikan 2014 melawan kesenjangan pendapatan dan korupsi oleh Pablo Iglesias. Situasi ini tentu saja berbeda dengan apa yang terjadi dengan populisme di Amerika Serikat, British National Party dan UK Independence Party (partai sayap kanan) di Inggris; Le Pen (pemimpin Front National-partai neo-fasis) di Prancis; Geert Wilders (pemimpin Partai untuk Kebebasan) di Belanda dan lainnya.

Di Indonesia, populisme punya sejarah panjang. Perlawanan terhadap kolonial memunculkan gerakan populis, setidaknya hingga pada awal-awal kemerdekaan.

Momentum kembali didapatkan di era reformasi. Secara umum, populisme Islam lebih banyak menunjukkan wajah konservatif. Termasuk yang terjadi di Indonesia juga ada dalam situasi demikian.

Populisme Islam di Indonesia lebih banyak melibatkan aliansi multi-kelas, bukan aspek ideasional atau organisasinya. Kebutuhan untuk membangun aliansi ini didorong oleh kepentingan yang sama karena merasa dirugikan oleh sistem sosial yang ada, melalui sebuah solidaritas yang dibangun dengan menggunakan simbol Islam. Gerakan ini turut hadir dengan cara mobilisasi dan homogenisasi terhadap beragam kepentingan dari masa yang berbeda terhadap kelompok yang diidentifikasi sebagai “elit”. (Hadiz, 2016)

Dalam kasus Indonesia, populisme Islam jauh lebih tidak dinamis dibandingkan dengan manifestasi di Turki dan Mesir karena kegagalan untuk mengembangkan aliansi lintas kelas yang jangkauannya luas dan koheren. Ketidakmampuan untuk mendinamisir gerakan bisa dilihat kembali pada sejarah kolonial dan proyek pascakolonial. Faktor utama yang membuatnya tidak berkembang adalah absennya komponen bisnis yang kuat dan besar dalam populasi baru Islam Indonesia, berbeda dengan Turki dan bahkan Mesir, serta kurangnya kendaraan yang mampu memonopoli klaim dalam mewakili *ummah* yang beragam secara internal.

Pada gilirannya, populisme Islam di Indonesia tidak bisa seperti apa yang terjadi di Turki atau Mesir. Populisme di Mesir menguasai masyarakat sipil dalam waktu yang sangat lama. Bahkan untuk sementara waktu mereka terkonsolidasi secara struktural sesaat setelah tumbang Husni Mubarak. Di Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) malah berkuasa di pemerintahan. Sementara di Indonesia, populisme tidak pernah memiliki cerita penguasaan terhadap dua ranah; kultural dan juga struktural.

Upaya tersebut bukannya tidak ada. Ruang yang terbuka memungkinkan gerakan populisme Islam masuk jalur politik. Mereka mengupayakan sebuah legislasi berbasis hukum agama, baik pada level nasional maupun melalui pelbagai peraturan daerah (Salim 2008; Burhanuddin 2012; Nasir 2013). Strategi lainnya dikembangkan dalam ranah keseharian. Ini yang saya sebut sebagai *creeping islamisation*, Islamisasi merangkak. Ketika islamisasi legislasi atau mengislamkan negara menemukan jalan terjal, maka upaya diambil melalui jalur berbeda. Jika target awal langsung menohok pada dimensi yang bersifat sistemik, struktural dan politik, pada perkembangan

berikutnya target mengarah pada wilayah kultural, sosial dan banyak berhubungan dengan aktivitas keseharian masyarakat.

Kebenaran, Pascakebenaran dan *Illiberal Democracy*

Karena atau menunjukkan sebuah keadaan dimana fakta-fakta objektif tidak terlalu berpengaruh dalam membangun opini public dibandingkan dengan perasaan atau keyakinan personal, maka keadaan pasca kebenaran menjadi tantangan demokrasi. Sebagai istilah, meski sudah berkembang selama satu decade terakhir, tetapi frekwensi kenaikan penggunaan “post-truth,” relative meningkat pada tahun 2016. Sebagai kata sifat, “post-truth” kemudian dihubungkan dengan kata benda “politik.” Istilah ini kurang lebih mengandung terminology mengenai dinamika politik yang sudah tidak lagi dibangun diatas fondasi fakta dan kebenaran. Fakta tentang ketidakberpih akan Trump terhadap imigran, sikap politiknya yang dinilai rasis, ternyata tidak sebangun dengan kenyataan bahwa suaranya lebih besar ketimbang Hillary Clinton.

Meski frekuensi penggunaan “post-truth” itu ditemukan dalam dinamika politik Amerika (juga Eropa), namun apa yang terjadi di beberapa bagian wilayah Indonesia sedang menunjukkan gejala kearah tersebut. Fragmentasi media yang menjadi sumber informasi kerap kali menyebabkan dengan cepatnya sebaran berita-berita yang belum tentu benar. Kasus pembakaran markas sebuah organisasi masyarakat di Bogor misalnya, dipicu karena berita yang tidak bertanggungjawab.

Momen pemilihan kepala daerah (terutama di Jakarta) juga setali tiga uang. Banyak kelompok masyarakat yang mendasarkan pilihannya pada emosi dan “keyakinan,” bukan fakta. Mereka cenderung untuk mencari sumber berita yang sesuai dengan selera elektoralnya. Proses berpikir menjadi terbalik, bukan tunduk pada fakta, tetapi mengkreasi sesuatu yang kemudian disebut sebagai (seolah-olah) fakta. Basisnya bukanlah fakta itu sendiri, melainkan keyakinan personal.

Bagi negara demokrasi, era “pasca-kebenaran” potensial menjadi kerikil. Roda demokrasi akan banyak menemukan ganjalan karena proses control tidak disandarkan pada basis data yang akurat. Mobilisasi masa menjadi lebih mudah dilakukan karenanya. Plus, dikuatkan dengan legitimasi moral dan agama. Disini, politik identitas dan juga termasuk didalamnya populisme, sangat memiliki potensi untuk menyediakan ruang bagi dinamika politik pascakebenaran tersebut.

Situasi ini mengingatkan saya akan apa yang disebut oleh Fareed Zakariya, seorang kolumnis News Week, sebagai *illiberal democracy* atau demokrasi tidak liberal. Maksudnya, demokrasi yang berjalan di negara kita sekarang ini masih berat sebelah. Bahwa ada partisipasi politik rakyat itu mungkin benar, tetapi partisipasi itu tak jarang diikuti dengan pelbagai ancaman yang sangat serius terhadap *civil liberty* atau kebebasan masyarakat. Padahal *civil liberty* merupakan landasan yang sangat penting didalam satu masyarakat yang demokratis atau dalam satu system demokrasi. Dengan menggunakan terminologi ala Zakariya ini, penulis bermaksud untuk menunjukkan bahwa demokrasi seringkali berjalan terpincang-pincang.

Bahkan dengan sangat tegas, Fareed Zakaria mengatakan bahwa praktek demokrasi yang (tidak) liberal itu memang bisa mengancam nilai-nilai yang dianggap merupakan fondasi masyarakat beradab. Yaitu nilai-nilai *liberal constitutional* seperti kebebasan, toleransi, pluralisme dan hak asasi manusia. Dan banyak negara yang saat ini juga mempraktekkan demokrasi yang illiberal atau demokrasi yang tidak liberal ini. Gejalanya jelas, bahwa demokrasi yang berkembang di negara-negara berkembang tersebut termasuk di negara kita adalah pertama-tama demokrasi dimulai dengan pemilu, kedua kebebasan untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik. Sementara aspek yang paling fundamental yaitu aspek kebebasan sipil kurang mendapat tempat.

Menyandarkan sebuah pilihan atas dasar kalkulasi moral atau keyakinan tertentu adalah suatu yang abash dalam masyarakat demokrasi. Pun terhadap sumber yang berasal dari tradisi. Catatannya, sumber-sumber tersebut harus siap diuji dan dihadirkan dalam sebuah diskusi dan debat terbuka. Disinilah pentingnya untuk menghadirkan “nalar publik” serta “pengalaman kemanusiaan” yang menjadi filter terhadap sumber-sumber elektoral. Keduanya akan sangat menentukan apakah keyakinan keagamaan yang diajukan sebagai inspirasi pilihan-pilihan politik itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau tidak.

Agama merupakan formasi budaya dimana pertanyaan komprehensif diajukan dan dijawab. Persoalan tentang masalah-masalah dunia dan akhirat ada jawabannya dalam agama. Ini yang membedakannya dengan politik. Jika politik dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan parsial, maka agama menjawab semua persoalan. Karena konstitusi bersifat manusiawi, maka ia tentu tidak dimaksudkan untuk menjawab semua persoalan kehidupan manusia. Konstitusi adalah pernyataan tentang apa yang harus

dilakukan oleh negara dan aparatusnya. Konsekuensinya, konstitusi ini tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada salah satu kelompok agama tertentu. Konstitusi harus netral dari klaim keagamaan.

Produk atau aturan negara bisa saja tidak diterima oleh kelompok keagamaan tertentu. Setelah melewati sebuah prosedur formal misalnya, ketentuan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan sebuah kelompok keyakinan keagamaan. Disinilah terjadi tarik menarik antara keadilan yang bersifat prosedural dengan keadilan substansial. Dalam wacana demokrasi, keadilan prosedural memang mendapatkan tempat yang penting. Perumusan sebuah aturan sangat berkaitan dengan bagaimana prosedur konstitusional itu telah ditempuh.

Meski begitu, bukan berarti keadilan seperti ini mengenyampingkan keadilan substansial. Ada “akal sehat” dan “pengalaman kemanusiaan” yang mengendalikan keadilan prosedural itu. Pertimbangan tentang keadilan substansial dan prosedural ini yang bisa menjadi ukuran dalam menakar segala produk perundangan di sebuah negara.

Bahan Bacaan

Gamwell, Franklin I., *The Meaning of Religious Freedom: Modern Politics and The Democratic Revolution*, State University of New York Press, 1995.

Hadiz, Vedi R., *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, Cambridge University Press, 2016

Muhtadi, Burhanuddin, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta: KompasGramedia, 2012

Mujiburohman, berjudul *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*, Amsterdam University Press, 2006

Nashir, Haidar, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2013

Ramli, Andi Muawiyah, et.al, *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam*, Jakarta: Opsi, 2006.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971.

_____, *Justice as Fairness: A Restatement*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001.

_____, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1993.

Salim, Arskal, *Challenging the Secular State, The Islamization of Law in Modern Indonesia*, University of Hawai Press, 2008

van Bruinessen, Martin, *Contemporary developments in Indonesian Islam: explaining the "conservative turn"*, Singapore: ISEAS Publishing, 2013.

Wogaman, J. Philip. *Christian Perspectives on Politics: Revised and Expanded*, Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press 2000.

Zakaria, Fareed, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, New York, London: WW. Norton Company, tt.